



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 486-491

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Puspan

Moh. Rasidi¹, Dimas Hidayatullah²

^{1,2}Universitas Nurul Jadid

¹Muhammad.rosyidi09@gmail.com, ²hidayatullahd966@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang: Pengelolaan keuangan di tingkat desa memegang peran penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya, termasuk dalam pengelolaan keuangan secara mandiri. Namun, pendekatan penganggaran yang masih bersifat tradisional dinilai belum mampu menjawab tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks. Dengan demikian, dibutuhkan penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang fokus pada pencapaian hasil akhir (outcome), serta menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pengelolaan keuangan desa, dengan fokus studi di Desa Puspan. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, di mana data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan kepala desa, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Hasil: Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) mampu memberikan pedoman yang lebih jelas dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran, implementasinya di tingkat desa masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip berbasis kinerja. Kesimpulan: Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sistem penganggaran desa yang tidak hanya administratif, tetapi juga berorientasi pada manfaat dan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. artikel.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Desa Puspan

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa memiliki peranan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini menjadi semakin penting mengingat desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dan bersifat otonom dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program-program pembangunan yang dibiayai dari sumber anggaran desa. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi lokal lainnya yang dimiliki oleh desa. Seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya, maka kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan desa yang tertib administrasi, terencana secara sistematis, serta mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat menjadi semakin mendesak. Sistem ini tidak hanya dituntut untuk mematuhi aturan dan prosedur teknis keuangan, tetapi juga harus mampu menjamin keberlanjutan pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas agar mampu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Pendekatan pengelolaan anggaran tradisional yang cenderung menitikberatkan pada input dan pengeluaran rutin selama ini dinilai kurang mampu merespons dinamika dan kompleksitas pembangunan desa yang semakin berkembang. Pola ini lebih menekankan pada aspek administratif semata, tanpa memperhatikan secara langsung keterkaitan antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan pencapaian pembangunan yang berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru yang mampu menjembatani kebutuhan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas secara lebih holistik. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) muncul sebagai alternatif strategis dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola

keuangan desa. Dengan mengaitkan setiap alokasi anggaran pada target kinerja yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, ABK mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented). Tidak hanya itu, penerapan ABK juga memperkuat prinsip transparansi anggaran serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam seluruh proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, implementasi ABK diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi pembangunan desa yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan..

Namun, implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks dan saling berkaitan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal pemahaman terhadap konsep dan mekanisme ABK itu sendiri. Banyak aparatur desa yang belum sepenuhnya menguasai pendekatan berbasis kinerja, baik dari sisi perencanaan, penetapan indikator kinerja, hingga proses evaluasi. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya penerapan prinsip-prinsip ABK dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai juga menjadi hambatan serius, mengingat ABK membutuhkan sistem pendukung yang terintegrasi untuk mengelola data, memantau realisasi anggaran, serta mengevaluasi capaian kinerja secara efisien. Tidak kalah penting, budaya organisasi di tingkat desa yang masih didominasi oleh kebiasaan administratif konvensional dan kurangnya orientasi terhadap hasil juga turut menghambat transformasi menuju sistem penganggaran yang lebih modern dan akuntabel. Hambatan-hambatan tersebut secara langsung memengaruhi kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas program pembangunan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat desa.

Desa Puspan menjadi salah satu contoh representatif dari desa yang telah mulai mengadopsi sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pengelolaan keuangan desanya. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya tata kelola anggaran yang tidak hanya berfokus pada pengeluaran, tetapi juga pada capaian kinerja yang terukur dan bermanfaat bagi masyarakat. Studi terhadap penerapan ABK di Desa Puspan menjadi penting dan relevan, karena dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana konsep ini diimplementasikan di lapangan, termasuk berbagai dinamika yang menyertainya. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai tantangan nyata yang dihadapi oleh aparatur desa, seperti keterbatasan kapasitas teknis, kurangnya sarana pendukung, serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja. Di sisi lain, studi ini juga membuka ruang untuk mengungkap peluang perbaikan dan inovasi, baik dari sisi perencanaan partisipatif, peningkatan kompetensi aparatur, maupun penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang signifikan dalam pengembangan kebijakan serta praktik pengelolaan keuangan desa yang berbasis hasil. Dengan demikian, implementasi ABK tidak hanya akan memperkuat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pemerintahan desa secara menyeluruh dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa..

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pengelolaan keuangan desa. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Puspan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Puspan merupakan salah satu desa yang aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan berbasis kinerja. Desa ini dinilai mampu merepresentasikan dinamika dan tantangan riil yang dihadapi dalam implementasi ABK di tingkat desa, sehingga menjadi contoh menarik untuk diteliti secara lebih mendalam.

Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling tepat dalam menggali informasi yang bersifat kontekstual dan kompleks. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi serta memahami secara menyeluruh pandangan, pengalaman, persepsi, dan praktik aktor-aktor lokal yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program desa. Fokus penelitian tidak hanya pada proses administratif, tetapi juga pada aspek-aspek kultural, sosial, dan kelembagaan yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan desa, seperti musyawarah desa, penyusunan RKP Desa, dan pelaporan keuangan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada berbagai informan kunci, di antaranya kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi keuangan, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, dan pendamping desa. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan pertanggungjawaban, dan notulen rapat.

Peneliti terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari tahap persiapan lapangan, penggalian data, hingga proses analisis. Instrumen penelitian disusun secara fleksibel dan terbuka, mengikuti dinamika lapangan dan kebutuhan penggalian data. Instrumen tersebut meliputi panduan observasi, daftar pertanyaan wawancara, serta lembar dokumentasi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip analisis interaktif, yakni data dikaji sejak awal pengumpulan dan terus dikembangkan secara bertahap hingga diperoleh sintesis yang komprehensif dan bermakna. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi metode (observasi dan wawancara), triangulasi sumber (beragam informan), triangulasi antar-peneliti (melalui diskusi dengan pembimbing dan ahli), serta triangulasi teori (perbandingan dengan literatur dan kerangka teoritik yang relevan). Selain itu, validitas temuan diperkuat melalui pengecekan silang antara data empiris dengan dokumen resmi.

Melalui pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan temuan-temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap praktik pengelolaan keuangan desa berbasis kinerja. Penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam ranah konseptual dengan memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan sektor publik di tingkat desa, maupun dalam ranah praktis sebagai bahan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan implementasi teknis di lapangan. Fokus utama pada penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan anggaran desa, seperti rendahnya efektivitas program, lemahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berperan sebagai bentuk dokumentasi ilmiah, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam mendorong transformasi sistem pengelolaan keuangan desa ke arah yang lebih transparan, efisien, partisipatif, dan akuntabel. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika penerapan ABK, baik dari sisi kelembagaan maupun sosial, hasil studi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual bagi penguatan tata kelola desa yang berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (ABK) di Desa Puspan merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan desa yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta hasil nyata dari program-program pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan dari unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, serta pendamping desa, ditemukan bahwa implementasi ABK telah dilakukan secara bertahap dan menunjukkan arah kemajuan yang positif. Meskipun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan baik dari segi pemahaman teknis, kapasitas aparatur, hingga dukungan sistem pelaporan yang terintegrasi. Dalam aspek perencanaan, perubahan pendekatan mulai tampak dengan digunakannya musyawarah desa sebagai forum utama dalam merumuskan program prioritas tahunan. Kepala desa menyampaikan bahwa proses musyawarah kini tidak hanya membahas daftar kegiatan, tetapi juga menetapkan tujuan program dan manfaat yang ingin dicapai bagi masyarakat. Artinya, perencanaan tidak lagi berbasis input semata, melainkan sudah mengarah pada orientasi output dan outcome. Setiap kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat ataupun perangkat desa diharuskan menyertakan tolok ukur keberhasilan, seperti jumlah penerima manfaat atau indikator sosial dan ekonomi yang terukur. Hal ini mencerminkan bahwa nilai kebermanfaatan program menjadi pertimbangan utama dalam penganggaran.

Langkah berikutnya dalam proses perencanaan adalah penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang sudah mengakomodasi prinsip-prinsip ABK. Sekretaris desa menjelaskan bahwa indikator kinerja mulai dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, baik dalam bentuk capaian fisik seperti panjang jalan yang dibangun, jumlah pelatihan yang dilaksanakan, maupun dampak sosial-ekonomi yang diharapkan dari program-program tersebut. Dengan pendekatan ini, desa berupaya memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil yang dapat diukur dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam praktik pengelolaan keuangan, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) digunakan sebagai alat bantu untuk mencatat, menyusun, dan melaporkan anggaran berdasarkan capaian kinerja. Kasi keuangan desa mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi ini sangat membantu dalam menyelaraskan antara belanja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui sistem digital ini, proses dokumentasi menjadi lebih sistematis dan mendukung transparansi dalam pelaporan. Selain itu, pelaporan kinerja menjadi lebih mudah dilakukan karena capaian setiap kegiatan dapat dimasukkan dan dilacak secara digital, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Penerapan ABK juga berdampak pada peningkatan efektivitas fungsi pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyambut baik pendekatan ini karena mereka kini memiliki tolok ukur yang lebih jelas dalam mengevaluasi pelaksanaan program. Tidak seperti sebelumnya yang hanya berpatokan pada realisasi anggaran,

kini BPD dapat menilai apakah kegiatan telah mencapai target kinerja dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini mendorong pengawasan yang lebih objektif dan berbasis data. Partisipasi masyarakat dalam penerapan ABK juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tokoh masyarakat menyatakan bahwa sistem ini mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk terlibat sejak awal proses perencanaan. Masyarakat tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga diberi ruang untuk menilai apakah usulan tersebut memiliki indikator manfaat yang jelas. Bahkan kelompok perempuan menyatakan bahwa mereka kini memiliki akses yang lebih besar untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam perumusan program-program desa, seperti pelatihan keterampilan rumah tangga yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan keluarga.

Meskipun menunjukkan arah positif, penerapan ABK di Desa Puspan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama berkaitan dengan pemahaman perangkat desa mengenai konsep dasar ABK. Beberapa aparat desa masih melihat anggaran sebagai alokasi nominal tanpa mengaitkannya dengan hasil program. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan teknis dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan menjadi hal yang sangat dibutuhkan agar seluruh pihak memahami bahwa setiap pengeluaran anggaran harus disertai dengan target hasil yang terukur. Tantangan kedua terletak pada perumusan indikator kinerja. Sekalipun sudah mulai diterapkan, penyusunan indikator yang akurat dan sesuai masih menjadi persoalan. Perangkat desa mengaku sering kesulitan menentukan indikator yang dapat merepresentasikan kinerja secara objektif. Misalnya, pembangunan jalan desa tidak hanya diukur dari panjang jalan yang selesai dibangun, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap aksesibilitas warga. Namun, pengukuran dampak semacam ini belum mudah dilakukan karena terbatasnya data, metode evaluasi, dan alat ukur yang tersedia di desa.

Dari sisi administrasi dan pelaporan, desa masih mengandalkan format pelaporan yang menekankan pada realisasi anggaran, bukan pencapaian kinerja. Kasi keuangan menyampaikan bahwa pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya terintegrasi. Ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih informasi, serta kesulitan dalam menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran. Diperlukan pengembangan sistem informasi yang mampu menggabungkan data keuangan dan data kinerja secara komprehensif, agar pelaporan benar-benar mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang diusung oleh sistem ABK. Dalam aspek pengawasan, meskipun indikator kinerja telah mulai digunakan, belum terdapat standar evaluasi yang baku yang dapat dijadikan acuan oleh pengawas internal desa seperti BPD. Proses evaluasi selama ini masih bersifat subjektif dan berbasis persepsi, bukan pada hasil pengukuran yang terstruktur. Akibatnya, pengawasan terhadap capaian program menjadi kurang konsisten dan sulit dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan anggaran ke depan.

Tantangan lain muncul dari sisi partisipasi masyarakat. Meskipun musyawarah desa telah berlangsung secara rutin, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya merumuskan program berdasarkan kebutuhan nyata dan manfaat yang dapat diukur masih rendah. Banyak usulan program yang disampaikan berdasarkan keinginan sesaat, bukan berdasarkan analisis kebutuhan strategis. Hal ini tentu menyulitkan desa dalam menerapkan prinsip ABK secara konsisten. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai logika anggaran berbasis kinerja perlu digencarkan agar masyarakat dapat lebih berperan secara strategis dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, juga masih belum optimal. Meskipun mulai diberikan ruang dalam musyawarah desa, suara mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam penentuan program prioritas. Padahal prinsip inklusi sosial merupakan salah satu landasan penting dalam sistem ABK agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perlu ada upaya afirmatif untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan agar sistem penganggaran yang adil dan partisipatif dapat terwujud. Terakhir, keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping desa menjadi hambatan penting dalam pengawalan implementasi ABK. Pendamping menyatakan bahwa proses pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan wilayah kerja yang luas. Padahal, keberadaan pendamping sangat penting dalam membantu perangkat desa menyusun program, merumuskan indikator kinerja, serta melakukan evaluasi yang berbasis data. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendamping desa menjadi kebutuhan mendesak agar keberlanjutan sistem ABK dapat dijamin.

Secara keseluruhan, implementasi sistem anggaran berbasis kinerja (ABK) di Desa Puspan telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pelaporan keuangan, serta mekanisme pengawasan yang mulai terstruktur. Perubahan ini mencerminkan adanya upaya serius dari pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan di berbagai lini strategis. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas sumber daya manusia, terutama aparat desa, dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ABK secara konsisten. Selain itu, dibutuhkan pengembangan sistem informasi yang terpadu dan mudah diakses, guna mendukung proses pengumpulan data,

monitoring, dan evaluasi kinerja secara real-time. Tidak kalah penting, penyusunan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama agar evaluasi program dapat dilakukan secara objektif. Di sisi lain, peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, menjadi faktor kunci dalam menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan. Dengan adanya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis pada evaluasi menyeluruh, sistem ABK memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tidak hanya transparan dan efisien, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

4. Kesimpulan

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) di Desa Puspan menunjukkan arah yang positif dalam mendorong reformasi tata kelola keuangan desa ke arah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata. Upaya ini mencerminkan kesadaran pemerintah desa untuk tidak lagi semata-mata fokus pada aspek administratif dan pengeluaran anggaran, melainkan juga pada efektivitas dan dampak dari setiap kegiatan yang dibiayai. Salah satu bentuk konkret dari implementasi tersebut terlihat pada pelaksanaan perencanaan partisipatif melalui forum musyawarah desa, yang menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan prioritas pembangunan. Selain itu, penggunaan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menandai adanya pergeseran paradigma dari pendekatan input-oriented menuju output dan outcome-oriented, di mana keberhasilan program diukur berdasarkan capaian dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam aspek teknis, pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) semakin memperkuat integrasi dalam pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan desa secara digital dan real-time, yang pada gilirannya mendukung prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Keseluruhan langkah ini menunjukkan bahwa Desa Puspan telah berada pada jalur yang progresif dalam mengembangkan sistem penganggaran yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan yang dinamis dan berbasis hasil. Namun demikian, implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) di Desa Puspan masih belum sepenuhnya optimal dan menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi agar sistem ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu hambatan utama terletak pada keterbatasan pemahaman perangkat desa mengenai konsep dasar dan mekanisme operasional ABK, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program dengan prinsip kinerja yang seharusnya diterapkan. Kesulitan dalam merumuskan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi persoalan krusial, karena indikator tersebut merupakan alat utama untuk mengukur keberhasilan program dan menentukan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Selain itu, lemahnya integrasi antara sistem pelaporan dan evaluasi menyebabkan hasil-hasil kinerja tidak terdokumentasikan secara sistematis, sehingga sulit dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Rendahnya partisipasi dari kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, juga menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan belum sepenuhnya inklusif. Tidak kalah penting, terbatasnya kapasitas pengawasan internal serta kurangnya jumlah dan kualitas pendamping desa turut menghambat proses pendampingan teknis yang seharusnya menjadi penguat utama dalam implementasi ABK. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan literasi kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus anggaran menjadi kunci penting dalam menciptakan implementasi ABK yang tidak hanya berkelanjutan secara sistemik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan berkeadilan.

Referensi

1. Ahmad, Iwan, and Puji Santoso, 'Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan', 3, 2025, pp. 1–10
2. Ahmad, and Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', *Proceedings*, 1.1 (2021), pp. 173–86
3. Anggraheni, E A P, and H B Prasetyo, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Ilmiah Akuntansi ...*, 1.22 (2022), pp. 87–97
<<https://jurnalilmiah.stiekia.ac.id/index.php/JAFA/article/view/26%0Ahttps://jurnalilmiah.stiekia.ac.id/index.php/JAFA/article/download/26/20>>
4. Balaka, Muh Yani, 'Metode Penelitian Kuantitatif', *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1 (2022), p. 130
5. Del Cid, Pedro Javier, Danny Hughes, Jó Ueyama, Sam Michiels, and Wouter Joosen, 'DARMA: Adaptable Service and Resource Management for Wireless Sensor Networks', *MidSens '09 - International Workshop on Middleware Tools, Services and Run-Time Support for Sensor Networks, Co-Located with the 10th*

- ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference, 2009, pp. 1–6, doi:10.1145/1658192.1658193
6. Desa, D I, and Giri Mulya, ‘Penyusunan Apbdesa Dengan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Di Desa Giri Mulya’, *Essence: Entrepreneurship and Small Business Research for Economic Resilience*, 1.1 (2022), pp. 55–62, doi:10.53698/essence.v1i1.7
 7. FIFIN, WELNI ELIA, ‘PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH’, *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405
 8. Moh. Rasidi, Alviana Novita Sari, “Optimalisasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pengembangan Wisata Pantai Greenthing Beach Desa Randutatah Kecamatan Paiton Probolinggo”, 2025 V o l . 4 N o . 2 : 5 7 22-572
 9. Fahrudin, A. Shofi, A. Masyhur, A. Qodir, & M. Kamilul, I. (2024). Analysis of the Potential of Creative Marketing Strategies in Increasing Sales in the ANURATU Convection Industry. *BALANCE JURNAL EKONOMI*. Volume 20 No 2
 10. R. Febri, E. Pradani, A. Masyhur, M. Ali. Z. A, M. N. Hidayat, M. Kamilul. I., (2024) “ANALISIS DESTINASI BUMDES BINOR TOUR CAFÉ DAN RESTO PANTAI BOHAY DENGAN RESERVASI PENUH. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* Vol. 18, No. 1